

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBERAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xxvi
DAFTAR ISI.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teori	23
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan.....	25
2. Teori Kedaulatan dan Demokrasi serta Konstitusi Sebagai <i>Middle Theory</i>	45
3. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Sebagai <i>Applied Theory</i>	52

G. Kerangka Pemikiran	55
H. Metode Penelitian	59
I. Orisinalitas Penelitian	65
J. Sistematika Penulisan	67
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	70
A. Konsep Keadilan, Sejarah Perkembangan dan Penerapannya dalam Hukum	70
1. Konsep Keadilan, Sejarah dan Penerapan Hukum di Dunia Barat	72
2. Konsep Keadilan, Sejarah dan Penerapan Hukum di Dunia Islam	88
3. Konsep Keadilan, Sejarah dan Penerapan Hukum di Indonesia	103
4. Keadilan, Hukum dan Kekuasaan	107
B. Kedaulatan Pada Umumnya	111
1. Paham Kedaulatan.....	111
2. Teori-teori Kedaulatan	113
C. Demokrasi Sebagai Perwujudan Kedaulatan	124
1. Pengertian Umum.....	124
2. Macam-Macam Demokrasi.....	128
3. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia	132
4. Demokrasi Menurut UUD NRI Tahun 1945.....	144

D. Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi	145
1. Pengertian Konstitusi	145
2. Nilai Penting Konstitusi Bagi Negara	148
3. Klasifikasi Konstitusi	152
E. Pemisahan dan Pembagian Kekuatan Sebagai Realisasi Konstitusi	161
1. Konsep Pemisahan Kekuasaan.....	161
2. Distribusi Kekuasaan Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen	165
3. Kekuasaan dan Kewenangan DPR sebagai Lembaga Legislatif	172
4. Kekuasaan dan Kewenangan Presiden sebagai Lembaga Eksekutif	177
F. Lembaga Perwakilan.....	183
1. Sejarah Lembaga Perwakilan.....	183
2. Teori-teori Lembaga Perwakilan.....	185
3. Sifat Lembaga Perwakilan	190
4. Macam-macam Lembaga Perwakilan	192
5. Fungsi Lembaga Perwakilan	194
G. Lembaga Perwakilan Bikameral	195
1. Sistem Bikameral	198
2. Sistem Bikameral diberbagai Negara.....	212

BAB III LATAR BELAKANG PERAN DPD SEBAGAI KAMAR	
KEDUA PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM	
KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD	
TAHUN 1945 BERBASIS KEADILAN	227
A. Bikameral di Indonesia.....	227
1. Bikameralisme berdasarkan UUD RIS Tahun 1949	228
2. Bikameralisme Berdasarkan UUD 1945 di Era Reformasi.....	234
B. Penuangan Parlemen Bikameral dalam UUD NRI Tahun 1945	269
1. Pengaturan Parlemen Bikameral dalam UUD NRI Tahun	
1945	269
2. Komposisi Keanggotaan Parlemen Bikameral menurut	
UUD NRI Tahun 1945	293
3. Mekanisme Pengisian Keanggotaan Parlemen Bikameral	
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	302
4. Fungsi dan Wewenang Parlemen Bikameral dalam	
Ketatanegaraan Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	310
BAB IV STRUKTUR DAN KEWENANGAN YANG TIDAK SAMA	
ANTARA DPD RI DAN DPR RI DALAM SISTEM KAMAR	
KEDUA YANG DIANUT INDONESIA SETELAH	
PERUBAHAN UUD TAHUN 1945 BERBASIS KEADILAN	324
A. Peran DPD RI Sebagai Keterwakilan Daerah Berdasarkan	
UUD NRI Tahun 1945	324

B. Perbedaan Kewenangan Antara DPD dan DPR dalam Undang-Undang Dasar 1945	347
1. Tinjauan Kewenangan Parlemen Bikameral Diberbagai Negara	347
2. Gagasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah	357
3. Tinjauan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945	364
BAB V REKONSTRUKSI PERAN DPD RI DI INDONESIA DENGAN MENGOPTIMALKAN MODEL PARLEMEN YANG IDEAL DALAM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD TAHUN 1945 DI MASA YANG AKAN DATANG.....	384
A. Kondisi DPD RI Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945	384
B. Prospek DPD sebagai Lembaga Perwakilan di Indonesia yang akan datang.....	401
BAB VI PENUTUP	413
A. Simpulan	413
B. Implikasi.....	417
C. Rekomendasi.....	420

DAFTAR PUSTAKA